



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PATI
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PATI
2022**

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati

Nomor :

Tanggal :

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2023 menggunakan proses perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pada berbagai Program Daerah dan Program Nasional. Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2023 ini telah melibatkan perwakilan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*), perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, serta para pelaku usaha.

Mekanisme perencanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, *bottom up* dan *top down planning*. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui penjangkauan aspirasi masyarakat dengan melibatkan *stakeholders*. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja secara fungsional. Pendekatan *bottom up planning* dilaksanakan melalui tahapan Musrengbangdes/Kelurahan, Musrengbang Kecamatan, Musrengbang Kabupaten, Musrengbang Propinsi dan Musrengbangnas untuk merancang program kegiatan pembangunan. Pendekatan *top down planning* merupakan langkah-langkah penyampaian kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi mengenai prioritas pembangunan.

Permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat pasca pandemi covid'19, masih perlu penanganan dan upaya penyelesaian yang di selaraskan dengan kebijakan strategis Rencana Pembangunan Daerah yang direalisasikan dalam bentuk usulan program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023. Tantangan yang harus di jawab pasca pandemi khususnya pada sektor perdagangan dan perindustrian dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sektoral.

Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi dan Informasi Perdagangan, kegiatan Perlindungan Konsumen, serta pelayanan Metrologi Legal. Untuk Pengelolaan Pasar kegiatan Retribusi Perijinan dan Penagihan, kegiatan Ketertiban dan kebersihan, kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan, serta kegiatan Promosi Produk Daerah dan Ekspor Impor.

Sedangkan Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan, Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, dan Kegiatan Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri diharapkan tetap bisa berjalan agar sektor Industri yang menyerap banyak tenaga kerja dari Masyarakat Kabupaten Pati tetap bisa berjalan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan dari Pemerintah.

Meskipun kegiatan sudah dilakukan lebih terbuka namun upaya *recovery* membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengembalikan roda perekonomian dari sector perdagangan dan sector perindustrian dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan pembangunan Perdagangan dan Perindustrian, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Akan tetapi, Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2023, merupakan pengejawantahan rencana dan isu-isu strategis di Kabupaten Pati yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2023 – 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023 ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2023 adalah :

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023 adalah :

- a. Menjabarkan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 Bidang Perdagangan dan Perindustrian dan sinkronisasi dengan Program Prioritas Nasional serta Program Indikatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke dalam rencana

program kegiatan prioritas dan harmonisasi dengan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2023.

- b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas rencana alokasi sumber daya dalam pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Masyarakat
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi dari Rencana Kerja Tahun 2021 menunjukkan bahwa :

1. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 Bidang Teknis memiliki 7 program, 10 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan 2 sub kegiatan refocusing total, sedangkan Eks BAU memiliki 1 program, 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan 2 sub kegiatan refocusing total. Secara umum realisasi capaian kinerja sebesar 95,57% dengan predikat sangat tinggi (ST).
2. Bidang Teknis memiliki 7 program, yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota, sedangkan Eks BAU memiliki 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah program tahun 2021 yang memenuhi capaian kinerja lebih dari 90% sebanyak 6 program, atau 85,71%, sedangkan program yang tidak memenuhi capaian kinerja (kurang dari 75%) sebanyak 1 program, atau 14,29%.
3. Program yang tidak memenuhi target capaian kinerja disebabkan oleh anggaran difokuskan tetapi target tetap dipasang (tidak disesuaikan menjadi nol), di sisi lain terdapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
4. Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas maka setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diharapkan lebih teliti dalam perencanaan kegiatan dan penentuan jadwal kegiatan yang tepat,

dengan mempertimbangkan skala prioritas serta dampak pandemi covid. Dan melakukan identifikasi resiko serta supervisi secara berkala sebagai wujud tindak pengendalian.

Uraian lengkap per kegiatan dapat dilihat di Tabel 2.1. yang merupakan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Th 2017-2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD TH 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2022		
						Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1		2	3	4		5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11
		NON URUSAN										
I	3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	%	100							
			Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	%	100							
			Persentase ASN yang menngkat kedisiplinannya	%	100							
			Persentase kelulusan diklat ASN	%	100							
			Persentase laporan kinerja dan keuangan	%	100							

I.1	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	yang disajikan Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
I.1.1	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	buku	100	20	20	20	100,00	2	42	42,00
				dokumen	1	20	-					-
I.1.2	3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD**	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	buku						2	2	
I.1.3	3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD**	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	buku						2	2	
I.1.4	3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	buku	100	20	20	20	100,00	-	40	40,00
I.1.5	3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data kinerja yang terisi	buku	100	19	20	20	100,00	10	49	49,00
I.2	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan									
I.2.1	3.30.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	dokumen	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
I.2.2	3.30.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN*	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	orang	1.131	-	30			-	-	-
I.2.3	3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	358	57	65	65	100,00	12	134	37,43

				orang	239	44	30	45	150,00	-	89	37,24
I.2.4	3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen perubahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	dokumen	10	5	5	5	100,00	5	15	150,00
I.2.5	3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD yang disusun	buku	100	20	20	20	100,00	10	50	50,00
I.3	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
I.3.1	3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	baju	1.945	385	415	200	48,19	-	585	30,08
I.3.2	3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan	48	5	2	2	100,00	-	7	14,58
				orang	60	200	200	-		-		-
I.4	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pendukung administrasi umum perangkat daerah									
I.4.1	3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jenis	81	1	1	1	100,00	1	3	3,70
I.4.2	3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	unit	153	58	2	2	100,00	2		-
I.4.3	3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	jenis	401	60	71	71	100,00	2	133	33,17
				jenis	10	3	2	2	100,00			-

				orang	11.204	1.490	5.000	5.000	100,00		6.490	57,93
I.4.4	3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	lembar	441100	13.500	71.600	72.060	100,64	12	85.572	19,40
I.4.5	3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	35	6	7	7	100,00	-	13	37,14
I.4.6	3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	perjalanan	4.381	837	775	775	100,00	775	2.387	54,49
I.4.7	3.30.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Jumlah arsip dinamis	jenis	20	-	20			-	-	-
I.5	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
I.5.1	3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit/paket	4	385	1	1		0	386	9.650
I.6	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								-	
I.6.1	3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani	surat	12.800	800	3.200	3.200	100,00	3.200		-
I.6.2	3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	rekening	222	53	46	46	100,00	40	139	62,61
			Jumlah layanan publik berbasis e-gov	laporan			1	-			-	
I.6.3	3.30.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	jenis	42	6	15	27	180,00	15	48	114,29
I.6.4	3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum	paket	11	2	2	2	100,00	2	6	54,55
I.7	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah paket Pemeliharaan Barang									

		Pemerintahan Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
I.7.1	3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	411	40	94	94	100,00	94	228	55,47
				unit	407	41	92	23	25,00	-	64	15,72
I.7.1	3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	unit	1.064	2	2	2	100,00	2	6	0,56
Rata-rata capaian kinerja (%)									100,15			
II	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Kebijakan Perlindungan Pasar Tradisional	%	100	60	65	-		70,00	130	130,00
			Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	%	100	19,41	13,00	(11,87)		14,00	21,54	21,54
II.1	3.30.02.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	target pendapatan retribusi pasar									
II.1.1	3.30.02.2.01.01	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang diperbaiki bangunan/sarprasnya	pasar se kab pati	15	20	20	40	200,00	20	80	533,33
II.1.2	3.30.02.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan	pasar	110	22	22	4	18,18	-	-	-
			Jumlah pasar yang dipelihara	pasar	110	22	22	4	18,18	-	26	23,64
			Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	pasar	105		21	21	100,00	20	41	39,05
			Jumlah pasar yang direvitalisasi	pasar daerah	10	3	5	-		-	3	30,00
			Jumlah alat mendukung pasar	pasar	105	12	21	12	57,14	20	44	41,90
			Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	pasar daerah	105	4	21	21	100,00	20	45	42,86

			Jumlah wajib retribusi pasar daerah		110	21	22	20	90,91	20	61	55,45
			Meningkatnya fasilitas kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	ijin pedagang dan 40 sewa kios	18874	2.700	4.000	2.518	62,95	4.000	9.218	48,84
II.2	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan									
II.2.1	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	kios	460	90	90	150	166,67	90	330	71,74
			Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	orang	300	10	25			25	35	11,67
II.2.2	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitas (tenda / gerobak PKL)	PKL	105	3	100			-	3	2,86
			Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	PKL	140	30	30			-	30	21,43
Rata-rata capaian kinerja (%)									90,45			
III	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pengaduan konsumen yang tertangani	%	100	15,3	12	100		12,00	127	127,30
III.1	3.30.04.2.01	Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi terupdate mengenai stok kebutuhan pokok dan barang penting									
III.1.1	3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	unit usaha	495	62	216	216	100,00	216		-
III.2	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok	Jumlah informasi									

		Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting									
III.2.1	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah unit usaha yang diawasi	unit usaha	225	20	48	165	343,75	48	233	103,56
			Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa	kepokmas	152	18	18	18	100,00	18	54	35,53
III.2.2	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota*	Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	paket(3 jenis)	13	3	1600	0		0	3	
III.3	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida									
			Jumlah informasi terupdate mengenai stok pupuk dan pestisida									
III.3.1	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	pengecer	93	15	50	64	128,00	60	139	149,46
Rata- rata capaian kinerja (%)									167,94			
IV	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan nilai ekspor pertahun	%	100	-2,07	20	15,99		30,00	44	43,92
IV.1	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai ekspor pertahun									
IV.1.1	3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	orang	80	-	20	20	100,00	-	20	25,00

		Kabupaten/Kota										
			Jumlah program yang dikoordinasikan	program	5	-	5			-	-	-
			Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	orang	80	-	20			5	5	6,25
IV.1.2	3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor**	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	ikm	260	90	20	20	100,00	20	130	50,00
			Jumlah jenis produk/komoditas ekspor	ikm	260	-	50	45	90,00	-		-
IV.1.3	3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	orang	80	-	20	-		-	-	-
			Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	orang	250	-	25			-	-	-
			Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	orang	240	-	8			5		-
Rata- rata capaian kinerja (%)									96,67			
V	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	%	100	5,51	11,5	0		12,00	18	17,51
V.1	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur yang sesuai standart									
V.1.1	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan tera ulang	buah	1820000	363000	383000	383000	100,00	383000	1129000	62,03
IV.1.2	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah SPBU yang dipantau	SPBU	154	13	32	38	118,75	-	51	33,12
Rata- rata capaian kinerja (%)									109,38			
VI	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	%	100	75,2	100	75		13,00	163	163,40

VI.1	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pedagang berbasis e-commerce										
VI.1.1	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	orang	90	-	25				-	-	
VI.1.2	3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan*	Jumlah pedagang yang dilatih	pedagang	40	80	50				80	200,00	
	3.31	BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN											
VII	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	%	100	15,46	7,50	4,99			8,00	28	28,45
VII.1	3.31.02.2.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi di bidang industri										
			Jumlah pelaku industri rumah tangga menjadi industri kecil yang dibina										
VII.1.1	3.31.02.2.01.02	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	IKM	160	-	40	40	100,00		-	40	25,00
			Jumlah IKM yang dikunjungi	IKM	80	2	25				-	2	2,50
			Jumlah perda yang dihasilkan	perda							1	1	
VII.1.2	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	IKM	80	-	20	20	100,00			20	25,00
			Jumlah Raperda yang disahkan	raperda		-	1	1	100,00		-	1	

			Jumlah IKM makanan ringan yg mendapat pelatihan	IKM	161	20	20	-		-	20	12,42
				IKM		-	2			-	-	
VII.1.3	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri**	Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	IKM	80	20	20			20	40	50,00
			Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	IKM	80	80	20			-	80	100,00
			Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	IKM	20	20	20			-	20	100,00
			Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	IKM	140	-	20			-	-	-
			Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	IKM	80	120	60			-	120	150,00
Rata- rata capaian kinerja (%)										100,00		
VIII	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga	%	100	61,05	7,50	-		8,00	69	69,05
			Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu			6,70	6	-		8,00	15	
			Persentase peningkatan produksi industri kreatif			37,50	7,50	11,80		6,00	55	
VIII.1	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah industri yang mendapat ijin/rekomendasi									

VIII.1.1	3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah IKM yang memenuhi standarisasi	IKM	80	20	35	35	100,00	60	115	143,75
			Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	orang/hari	240	-	60			-	-	-
			Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	IKM	480	-	-			-	-	-
			Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	IKM	40	-	40			-	-	-
			Jumlah IKM yang difasilitasi	IKM	80	-	25			-	-	-
			Jumlah IKM yang mendapatkan akses informasi	IKM	12	-	25			-	-	-
			Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	IKM	450	-	89			-	-	-
			Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	IKM	100	-	35			-	-	-
			Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	IKM	100	-	35			-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D 8)									95,57			

Catatan :

* Refokusing total

** Sub Kegiatan 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa kinerja pelayanan PD dapat diukur dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) PD, selain itu juga dapat diukur berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Program. Selama kurun waktu 2021 capaian kinerja layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan misi meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri dapat dilihat di bawah ini;

Indikator yang digunakan dalam mencapai tujuan pertama, meningkatnya produktivitas dan inovasi bidang perdagangan dan industri, ada 2 yaitu:

1. Indikator Kinerja *pertama* : Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan pada tahun 2021, target sebesar 5,8% dengan capaian sebesar 7,12% (perhitungan berdasar angka proyeksi dari BPS);
2. Indikator Kinerja *kedua* : Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri pada tahun 2021, target sebesar 5,4% dengan capaian sebesar 3,42%. Hal ini menunjukkan bahwa target tidak tercapai; (perhitungan berdasar angka proyeksi dari BPS).

Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran meningkatkan kontribusi perdagangan dalam perekonomian, dan meningkatkan kontribusi perindustrian dalam perekonomian, ada 3 indikator yaitu:

3. Indikator Kinerja *ketiga* : Pertumbuhan Nilai Ekspor pada tahun 2021, target sebesar 6,5% dengan capaian sebesar 59,76%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

4. Indikator Kinerja *keempat* : Persentase sarana perdagangan (pasar) yang ber-SNI pada tahun 2021, target sebesar 0,94% dengan capaian sebesar 5%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
5. Indikator Kinerja *kelima* : Produktivitas lapangan usaha industri pada tahun 2021, target sebesar 130% dengan capaian sebesar 397,15 %; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

Indikator yang digunakan dalam program yang mendukung sasaran tersebut, ada 9 indikator yaitu:

6. Untuk melaksanakan program peningkatan dan pengembangan ekspor digunakan Indikator Kinerja *keenam* yaitu peningkatan nilai ekspor pertahun, pada tahun 2021 target sebesar 20% dengan capaian sebesar 59,76%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
7. Untuk melaksanakan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen digunakan Indikator Kinerja *ketujuh* yaitu pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala) pada tahun 2021 target sebesar 11,5% dengan capaian sebesar 0%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target.
8. Untuk melaksanakan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting digunakan Indikator Kinerja *kedelapan* yaitu persentase pengaduan konsumen yang tertangani pada tahun 2021 target sebesar 11,5% dengan capaian sebesar 100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Saranan Distribusi Perdagangan digunakan 4 indikator yaitu:

9. Indikator Kinerja *kesembilan* yaitu Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional pada tahun 2021 target sebesar 65% dengan capaian sebesar 0%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih

dibawah target, karena pada tahun tersebut tidak ada penambahan kebijakan baru.

10. Indikator Kinerja *kesepuluh* yaitu Persentase peningkatan manajemen pasar daerah pada tahun 2021 target sebesar 12% dengan capaian sebesar 14,26%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
11. Indikator Kinerja *kesebelas* yaitu Proporsi perdagangan berbasis e-commerce pada tahun 2021 target sebesar 12% dengan capaian sebesar 75,20%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

12. Indikator Kinerja *keduabelas* yaitu persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan pada tahun 2021 target sebesar 13% capaian sebesar 14,29%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi diatas target.

Untuk melaksanakan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota digunakan 2 indikator yaitu :

13. Indikator Kinerja *ketiga belas* yaitu pertumbuhan produksi industri rumah tangga pada tahun 2021 target sebesar 7,5% dengan capaian sebesar 0%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target, karena IKM ber SNI jumlahnya tetap tidak ada kenaikan.

14. Indikator Kinerja *keempat belas* yaitu persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu pada tahun 2021 target sebesar 7,5% dengan capaian sebesar -100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target, karena tidak ada kenaikan IKM.

Indikator yang digunakan dalam mencapai tujuan kedua, meningkatnya daya saing sektor industri unggulan dan sektor industri kreatif ada 2 yaitu:

15. Indikator Kinerja *keenam belas* : Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri pada tahun 2021, target sebesar 7% dengan capaian sebesar 0,56%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target, karena terdapat penurunan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri dikarenakan daya beli/permintaan turun.

16. Indikator Kinerja *ketujuh belas* : Pertumbuhan industri kreatif daerah pada tahun 2021, target sebesar 7% dengan capaian sebesar 1%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target, karena terdapat penurunan industri kreatif daerah disebabkan daya beli/permintaan turun.

Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran meningkatkannya produktivitas sektor industri unggulan dan industri kreatif ada 2 indikator yaitu:

17. Indikator Kinerja *kedelapan belas* : Produktivitas sektor industri unggulan pada tahun 2021, target sebesar 1,5% dengan capaian sebesar 4%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.

18. Indikator Kinerja *kesembilan belas* : Produktivitas sektor industri kreatif pada tahun 2021, target sebesar 1,4% dengan capaian sebesar 1,22%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target.

Indikator yang digunakan dalam program yang mendukung sasaran tersebut, ada 3 indikator yaitu:

19. Untuk melaksanakan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri digunakan Indikator Kinerja *kedua puluh* yaitu Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil pada tahun 2021, target sebesar 7,5% dengan capaian sebesar 4,99%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target.
20. Indikator Kinerja *kelima belas* yaitu Persentase peningkatan produksi industri kreatif pada tahun 2021 target sebesar 6% dengan capaian sebesar 11,80%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.
21. Untuk melaksanakan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional digunakan Indikator Kinerja *kedua puluh satu* yaitu persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce pada tahun 2021 target sebesar 7,5% dengan capaian sebesar 9,41%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.

Pencapaian kinerja pelayanan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021
Kabupaten Pati

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program OPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Indikator Tujuan 1:											
1.	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha Perdagangan			4,80	5,20	5,60	5,80	6,00	10,28	-0,33	7,12	
2.	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha Industri			4,60	4,87	5,20	5,40	5,90	7,46	-0,36	3,42	
	Indikator Sasaran:											
1.1	Pertumbuhan Nilai Ekspor			5,50	6,00	6,00	6,50	7,00	14,44	-2,07	59,76	
1.2	Persentase Sarana Perdagangan (pasar) yang ber-SNI			0,00	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	5,00	5,00	
1.3	Produktivitas lapangan usaha industry			0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	158,53	158,53	397,15	
	Indikator Program:											

1	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)			10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	52,47	5,51	0,00	Menurunnya UTTP tera dikarenakan permintaan tera masyarakat berkurang, 2. Jumlah UTTP tera ulang tidak mengalami penambahan sesuai potensi yang ada di wilayah Kab. Pati
2	Persentase pengaduan konsumen yang tertangani			10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	101,90	15,30	100,00	
3	Peningkatan nilai ekspor pertahun			15,00	15,00	20,00	20,00	30,00	-2,39	-2,07	59,76	
4	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional			50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	55,00	60,00	0,00	tidak ada kebijakan baru
5	Persentase peningkatan manajemen pasar daerah			10,00	11,00	12,00	12,00	14,00	55,00	-10,07	14,26	
6	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce			10,00	10,50	11,00	12,00	13,00	76,00	79,00	75,20	
7	Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan			11,00	12,00	13,00	13,00	14,00	100,00	19,41	14,29	
8	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga			6.5	7,00	7,00	7,50	8,00	31,00	15,46	0,00	jumlah IKM ber SNI tetap tidak ada kenaikan
9	Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu			6.5	7,00	7,00	7,50	8,00	14,29	37,50	-100,00	tidak ada kenaikan IKM
B	Indikator Tujuan 2:											
1	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri			5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	6,54	0,46	0,56	terdapat penurunan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri dikarenakan daya beli/permintaan turun

2	Pertumbuhan industri kreatif daerah			5,50	6,00	6,50	7,00	8,00	9,30	-5,2	1,00	terdapat penurunan industri kreatif daerah dikarenakan daya beli/permintaan turun
	Indikator Sasaran:											
2.1	Produktivitas sektor industri unggulan			1,30	1,30	1,40	1,50	1,60	1,39	1,39	4,00	
2.2	Produktivitas sektor industri kreatif			1,20	1,20	1,30	1,40	1,50	1,24	1,24	1,22	terdapat penurunan produktivitas industri kreatif dikarenakan daya beli/permintaan turun
	Indikator Program:											
1	Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil			6,50	7,00	7,00	7,50	8,00	6,54	61,05	4,99	terdapat penurunan industri rumah tangga menurun dikarenakan daya beli/permintaan turun
2	Persentase peningkatan produksi industri kreatif			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	9,30	6,70	11,80	
3	Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce			6,00	6,5	7,00	7,50	8,00	7,22	7,59	9,41	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

Untuk Bidang Perdagangan, yaitu :

1. Terjadi penurunan atas pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standart yang ditera secara berkala. Selain permintaan tera timbangan bandul yang akan dijual ke luar Jawa, penurunan juga dipicu wilayah kerja UPT Metrologi yang dahulu se eks Karsidenan Pati sekarang menjadi se Kabupaten Pati.
2. Terjadi tren peningkatan jumlah toko modern selama periode lima tahun terakhir kondisi ini dapat mengancam keberlangsungan para pedagang di pasar tradisional.

Untuk bidang Perindustrian, yaitu :

1. Peningkatan kelas industri rumah tangga menjadi industri kecil masih rendah
2. Keterkaitan industri di hulu khususnya industri skala rumah tangga dengan industri hilir baik skala kecil, menengah maupun besar hingga saat ini belum terjalin secara optimal. Hal ini kemungkinan disebabkan karena belum didukung kelembagaan pelaku industri.
3. Pengelolaan pelaku usaha e-bisnis belum optimal sehingga kurang mendongkrak pertumbuhan dan produktivitas komoditas unggulan serta industri kreatif daerah.
4. Pemanfaatan teknologi dan penerapan SNI oleh industri kecil masih rendah.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati telah melakukan penyesuaian terhadap analisis kebutuhan terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pati yang semula senilai Rp. 26.417.213.000,- menjadi Rp. 28.266.400.000,-.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rancangan Awal Rp. 18.613.568.000,- hasil analisis kebutuhannya menjadi Rp. 18.229.400.000,- penurunan ini dikarenakan ada penyetaraan eselon 4 menjadi pejabat fungsional sehingga berimplikasi terhadap besaran tunjangan fungsional.

Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan Rancangan Awal Rp. 120.339.000,- hasil analisis kebutuhannya menjadi Rp. 50.600.000,- penurunan ini dikarenakan implikasi adanya keterbatasan APBD untuk kegiatan teknis.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Rancangan Awal Rp. 7.058.081.000,- hasil analisis kebutuhannya menjadi Rp. 9.636.400.000,- penambahan ini dikarenakan alokasi pembangunan fisik dari DPUTR dan Aspirasi Dewan.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Rancangan Awal Rp. 50.000.000,- hasil analisis kebutuhannya menjadi Rp. 40.000.000,- penurunan ini dikarenakan implikasi adanya keterbatasan APBD untuk kegiatan teknis.

Program Pengembangan Ekspor Rancangan Awal Rp.145.225.000,- hasil analisis kebutuhannya menjadi Rp.40.000.000,- penurunan ini dikarenakan implikasi adanya keterbatasan APBD untuk kegiatan teknis.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Rancangan Awal Rp. 75.000.000,- hasil analisis kebutuhannya menjadi Rp.70.000.000,- penurunan ini dikarenakan implikasi adanya keterbatasan APBD untuk kegiatan teknis.

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Rancangan Awal Rp. 125.000.000,- hasil analisis kebutuhannya menjadi Rp. 100.000.000,- penurunan ini dikarenakan implikasi adanya keterbatasan APBD untuk kegiatan teknis.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Rancangan Awal Rp. 130.000.000,- hasil analisis kebutuhannya menjadi Rp.70.000.000,- penurunan ini dikarenakan implikasi adanya keterbatasan APBD untuk kegiatan teknis.

Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota Rancangan Awal Rp. 30.000.000,- hasil analisis kebutuhannya menjadi Rp. 20.000.000,- penurunan ini dikarenakan implikasi adanya keterbatasan APBD untuk kegiatan teknis.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Rancangan Awal Rp. 30.000.000,- hasil analisis kebutuhannya menjadi Rp. 0,- penurunan ini dikarenakan implikasi adanya keterbatasan APBD untuk kegiatan teknis.

Secara lebih terinci Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat di Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pati

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				26.417.213.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				28.266.400.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				26.227.213.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				28.176.400.000	
	NON URUSAN				18.613.568.000	NON URUSAN				18.229.400.000	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan		18.613.568.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan		18.229.400.000	
			Persentase Layanan Administrasi yang tertangani					Persentase Layanan Administrasi yang tertangani			
			Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya					Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya			
			Persentase kelulusan diklat ASN					Persentase kelulusan diklat ASN			

			Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik					Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik			
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.350.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.350.000	
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.092.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.092.000	
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pati	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.083.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pati	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.083.200	
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.400.000	
I.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pati	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	3.162.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pati	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	3.162.000	
I.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.612.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.612.800	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan		13.599.244.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan		13.275.310.000	

I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pati	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2184 Orang/bulan	13.377.33 8.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pati	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2184 Orang/bulan	13.052.99 2.000	
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52 Dokumen	220.906. 400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52 Dokumen	220.906. 400	
I.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pati	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000. 000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pati	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.411. 600	
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pendukung administrasi perangkat daerah		375.837.6 00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pendukung administrasi perangkat daerah		320.186.00 0	
I.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pati	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.650. 000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pati	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.800. 000	
I.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pati	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	277.482. 100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pati	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	246.640. 500	
I.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pati	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	17.799. 500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pati	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	17.799. 500	
I.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pati	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	65.906. 000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pati	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	49.946. 000	
I.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		4.366.240.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		4.396.880.000	
I.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2.000. 000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2.400. 000	

I.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	480 Laporan	694.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	480 Laporan	694.200.000	
I.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	71.100.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	71.100.000	
I.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	194 Laporan	3.598.940.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	194 Laporan	3.629.180.000	
I.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		249.896.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		214.674.000	
I.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	175.404.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	150.004.000	
I.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pati	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.492.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pati	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	64.670.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				7.613.645.000					9.947.000.000	

II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		persentase pedagang yang telah memiliki ijin	27,88%	120.339.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pedagang yang telah memiliki ijin		50.600.000	
II.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		jumlah pedagang yang memiliki ijin		110.339.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah pedagang yang memiliki ijin		50.600.000	
II.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pati	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4000 Dokumen	110.339.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pati	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4000 Dokumen	50.600.000	
II.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		10.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		-	
II.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Pati	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang		10.000.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Pati	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang		-	
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana prasarana perdagangan yang dibangun/diperbaiki	100%	7.058.081.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana prasarana perdagangan yang dibangun / diperbaiki		9.636.400.000	
			Persentase pelaku perdagangan yang sesuai ketentuan	37,64	40.000.000			Persentase pelaku perdagangan yang sesuai ketentuan		10.000.000	
III.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarpras perdagangan yang dibangun/diperbaiki		7.058.081.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarpras perdagangan yang dibangun/diperbaiki		9.636.400.000	

			Jumlah pelaku perdagangan yang dibina					Jumlah pelaku perdagangan yang dibina			
III.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	20 Unit	6.844.250.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	20 Unit	9.449.000.000	
III.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20 Unit	213.831.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20 Unit	187.400.000	
III.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan		40.000.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan tidak sesuai ketentuan		10.000.000	
III.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	20.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	10.000.000	
III.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	20.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	-	
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Pertumbuhan stok komoditas penyumbang inflasi	9,25%	50.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Pertumbuhan stok komoditas penyumbang inflasi		40.000.000	
IV.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah komoditas pangan bergejolak (volatile food)		10.000.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah komoditas barang bergejolak (Volati lefood)		15.000.000	

IV.1.1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pati	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48 Laporan	10.000.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pati	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48 Laporan	15.000.000	
IV.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah informasi harga, stok dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pada pelaku usaha		30.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah informasi harga, stok dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pada pelaku usaha		10.000.000	
IV.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	15.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	10.000.000	
IV.2.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	15.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	-	
III	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terbaharui		10.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terbaharui		15.000.000	
1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Pati	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	40 Laporan	10.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Pati	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	40 Laporan	15.000.000	

			dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%					dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh komitmen ekspor	1 Pelaku Usaha	145.225.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Peningkatan nilai ekspor pertahun		40.000.000	
V.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor yang Ikut Promosi		145.225.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Nilai ekspor pertahun		40.000.000	
V.1.1	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Pati	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	105.225.000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Pati	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	21.500.000	
V.1.2	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Pati	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	5 Pelaku Usaha	40.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Pati	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	5 Pelaku Usaha	18.500.000	
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pertumbuhan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	5%	75.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)		70.000.000	
I	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		jumlah layanan tera,tera ulang dan pengawasan		75.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah alat ukur yang sesuai standart		70.000.000	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Pati	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	185000 Unit	75.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Pati	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	185000 Unit	70.000.000	
VII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Pertumbuhan jumlah Produk UMKM difasilitasi yang terjual di dalam negeri	20%	125.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Proporsi perdagangan berbasis e-commerce		100.000.000	

VI.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk Promosi Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri		125.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah pedagang berbasis e-commerce		100.000.000	
VI.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	90.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	100.000.000	
VI.1.2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	35.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				190.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				90.000.000	
VIII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase capaian Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	10%	130.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil		70.000.000	
VIII.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Realisasi atas Rencana Aksi di Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten		130.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah regulasi di bidang industri		70.000.000	
VIII.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	35.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen		

VIII.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen		
VIII.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	35.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	30.000.000	
VIII.1.4	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	40.000.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	40.000.000	
IX	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri	40%	3 0.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Pertumbuhan produksi industri rumah tangga		20 .000.000	
IX.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Industri yang difasilitasi dan di awasi		3 0.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah industri yang mendapat ijin/rekomendasi		20 .000.000	

IX.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	60 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	60 Dokumen		
IX.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Dokumen	20.000.000	
X	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Prosentase Informasi Industri yang Dikelola SIINas	6%	30.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce			-
X.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Industri Kecil yang terdaftar di aplikasi SIINAS		30.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku industri rumah tangga berbasis e-commerce			-
X.1.1	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data	3 Dokumen	30.000.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	Kab. Pati	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data	3 Dokumen		

	Kabupaten/Kota melalui SIINas		Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			Kabupaten/Kota melalui SIINas		Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			
	TOTAL				26.417.213.000	TOTAL				28.266.400.000	

2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbang RKPD Kecamatan, khususnya program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan Bidang Urusan Perdagangan dan Perindustrian, pada tahun 2023 tertuang dalam pokok pikiran yang terdapat dalam 3 Program yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Untuk Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terdapat 37 pokok pikiran yang disetujui dalam sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan yaitu :

1. Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi (saluran) 11 paket, dengan 10 paket masing-masing disetujui dengan nilai Rp. 194.493.000,00 dan 1 paket disetujui dengan nilai Rp. 170.196.000,00.
2. Belanja Modal Bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar 1 paket, disetujui dengan nilai Rp. 194.139.000,00.
3. Belanja Modal Bangunan gedung kantor 14 paket, masing-masing disetujui dengan nilai Rp. 194.812.800,00.
4. Belanja Modal Jalan Kabupaten kantor 11 paket, masing-masing disetujui dengan nilai Rp. 194.373.700,00.

Untuk Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri terdapat 1 pokok pikiran yang disetujui dalam sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota yaitu

5. Belanja Publikasi media cetak sebanyak 2000 MMK disetujui dengan nilai Rp. 50.000.000,-.

Untuk usulan masyarakat Gunungwungkal disinkronkan dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat yaitu :

6. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, pembiayaan, penguatan kelembagaan penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi Usaha Koperasi - (Pelatihan bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Produktif)

Lebih lanjut terkait program dan kegiatan masyarakat yang tertuang dalam pokok pikiran dapat dirinci dalam tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
2	3	4	5		6	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase sarana prasarana perdagangan yang dibangun / diperbaiki			
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarpras perdagangan yang dibangun/diperbaiki			
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Daerah Kabupaten Pati	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			
		Pasar Bulumanis		67,2	m2	Pembangunan Tambahan Sanpras Pasar Bulumanis

			Pasar Gembong		67,2	m2	Pembangunan Tambahan Sanpras Pasar Gembong
			Pasar Juwana Baru		67,2	m2	Pembangunan Tambahan Sanpras Pasar Juwana Baru
			Pasar Kayen Baru		67,2	m2	Pembangunan Tambahan Sanpras Pasar Kayen Baru
			Pasar Sleko 1		67,2	m2	Pembangunan Tambahan Sanpras Pasar Sleko 1
			Pasar Winong 1		67,2	m2	Pembangunan Tambahan Sanpras Pasar Winong 1
			Pasar Winong 2		67,2	m2	Pembangunan Tambahan Sanpras Pasar Winong 2
			Pasar Dosoman		67,2	m2	Pembangunan Tambahan Sanpras Pasar Dosoman
			Plaza Pragolo		67,2	m2	Pembangunan Tambahan Sanpras Plaza Pragolo
			Kantor Metrologi		67,2	m2	Rehabilitasi Kantor Metrologi
			Pasar Tayu		67,2	m2	Pembangunan Los Pasar Tayu
			Pasar Tayu Kulon		67,2	m2	Pembangunan Los Pasar Tayu Kulon

			Pasar Rogowongso		67,2	m2	Pembangunan Tambahan Sanpras Pasar Rogowongso
			Pasar Puri Baru		67,2	m2	Pembangunan Los Pasar Puri Baru
			Pasar Wage		980,5	m3	Pengurangan Pasar Wage
			Pasar Kayen Baru		939,1	m2	Pengaspalan Halaman Pasar Kayen Baru
			Pasar Sleko 2		939,1	m2	Pengaspalan Jalan Lingkungan Pasar Sleko 2
			Pasar Puri Baru		939,1	m2	Pengaspalan Pasar Puri Baru
			Pasar Winong 1		939,1	m2	Pengaspalan Pasar Winong 1
			Pasar Winong 2		939,1	m2	Pengaspalan Pasar Winong 2
			Pasar Pujasera		939,1	m2	Pengaspalan Pasar Pujasera
			Plaza Pragolo		939,1	m2	Pengaspalan Halaman Plaza Pragolo
			Disdagperin		939,1	m2	Pengaspalan Halaman Kantor Disdagperin
			Pasar Trangkil		939,1	m2	Pengaspalan Pasar Trangkil
			Pasar Tayu		939,1	m2	Pengaspalan Halaman Pasar Tayu
			Pasar Tayu Kulon		939,1	m2	Pengaspalan Halaman Pasar Tayu Kulon
			Pasar Bulumanis		249,35	m1	Pembangunan Saluran Pasar Bulumanis
			Pasar Tayu Kulon		249,35	m1	Pembangunan Saluran Pasar Tayu Kulon
			Pasar Wedarijaksa		249,35	m1	Pembangunan Saluran Pasar Wedarijaksa
			Pasar Gembong		249,35	m1	Pembangunan Saluran Pasar

							Gembong
			Pasar Porda Juwana		249,35	m1	Pembangunan Saluran Pasar Porda Juwana
			Pasar Juwana Baru		249,35	m1	Pembangunan Saluran Pasar Juwana Baru
			Pasar Kayen Baru		249,35	m1	Pembangunan Saluran Pasar Kayen Baru
			Pasar Sleko 2		249,35	m1	Pembangunan Saluran Pasar Sleko 2
			Pasar Wage		249,35	m1	Pembangunan Saluran Pasar Wage
			Pasar Sopyono		249,35	m1	Pembangunan Saluran Pasar Sopyono
			Pasar Trangkil		218,2	m1	Pembangunan Saluran Pasar Trangkil
	2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Proporsi perdagangan berbasis e-commerce			
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah pedagang berbasis e-commerce			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
II		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					

		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Persentase capaian dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten			
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab./Kota		Jumlah realisasi atas rencana aksi di dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten			
	1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Gunungwungkal, Kab. Pati	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat			Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, pembiayaan, penguatan kelembagaan penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi Usaha Koperasi - (Pelatihan bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Produktif)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pandemi COVID-19 pada Tahun 2023, merupakan tahun bangkit setelah tiga tahun melalui pandemi covid '19, meskipun dampaknya masih terasa, baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian, namun secara bertahap sudah bisa teratasi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang telah divaksin baik vaksin dasar maupun booster. Tanda-tanda pemulihan ekonomi, sudah mulai kelihatan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif baik nasional maupun daerah (khususnya Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati). Upaya pemulihan ekonomi secara simultan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai instrument kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong perekonomian domestik. Kebijakan pembangunan Nasional diprioritaskan pada Tahun 2023 : (a) penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (b) pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (c) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing; (d) revolusi mental dan pembangunan Kebudayaan; (e) penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (f) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; (g) penguatan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada rencana pembangunan Tahun 2023 diprioritaskan pada : (a) pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari yang berwawaskan kepada keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; (b) pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; (c) pemantapan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM yang berdaya saing; (d) perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah; Tahun 2023 adalah tahun pertama implementasi RPD Kabupaten Pati periode 2023-2026 (RPJMD transisi sebagaimana amanah Inmendagri Nomor

70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022). Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (transisi) tersebut, maka kebijakan pembangunan sebagaimana RKPD Kabupaten Pati Tahun 2023 III-2 skema yang telah ditetapkan, serta dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan beberapa capaian pembangunan Kabupaten Pati pada periode tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun pertama (Tahun 2023) pembangunan jangka menengah tersebut menyusun beberapa target/sasaran pembangunan maka sektor yang paling sesuai untuk dikembangkan dan dapat menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten Pati dalam menentukan arah kebijakan ekonominya adalah industri berbasis pertanian (agro-industri). Agroindustri yang merupakan sub sistem agribisnis dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan menjaga kestabilan harga produk pertanian karena terciptanya rangkaian hulu-hilir yang saling mengkait yang membentuk rantai pasok. Tentunya hal ini harus disertai dengan penguatan kelembagaan petani dan jejaring usaha antara kelompok tani sebagai pemasok bahan baku dengan sektor manufaktur serta perluasan pasar produk pertanian dan produk olahan. Sektor industri berbasis agro harus diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah. Para pelaku agro-industri lokal harus mulai diperkenalkan platform e-business dalam menjalankan usaha/bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan bisa dilakukan secara kelompok/klaster. Sektor perdagangan yang menempati urutan ke tiga terbesar kontribusinya terhadap PDRB diproyeksikan dapat terus tumbuh signifikan sehingga dapat ikut mengatrol laju pertumbuhan ekonomi ke depan. Pemerintah daerah

harus pro aktif memberikan pendampingan baik melalui pengembangan jejaring pasar maupun dalam pemanfaatan e-commerce bagi pelaku usaha (dari hulu ke hilir) sebagai upaya untuk mendongkrak volume perdagangan, khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil.

Sektor perdagangan merupakan sektor terbesar ketiga kontribusinya terhadap perekonomian daerah bahkan memiliki kecenderungan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dalam pemasaran produk

yang menandai era industri 4.0. Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang mengelola pasar daerah menghadapi tekanan persaingan dalam pengelolaan pasar yang saat ini mulai bergeser pada pasar virtual dan pasar retail modern dituntut menerapkan mix management pasar berbasis konvensional-modern-digital. Pengelolaan pasar daerah konvensional mengacu pada penyediaan layanan pasar (fisik) yang lebih baik dan berkualitas (hyginitas, keamanan dan ketertiban) dalam mendukung roda perekonomian masyarakat harus menjadi perhatian yang lebih bagi pemerintah daerah, mengingat semakin merebaknya jumlah pasar modern, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi telah merambah wilayah luar kota (kecamatan) dimana wilayah itu merupakan teritori pasar bagi pelaku pedagang kecil dengan latar belakang kondisi sarana prasarana yang sangat terbatas dan tentu kalah bersaing dengan pasar retail modern. Disamping itu Pemerintah Daerah juga dituntut beradaptasi menuju digitalisasi dengan mendorong dan memberikan fasilitasi/pendampingan bagi pelaku usaha (perdagangan) untuk bisa meleak teknologi informasi agar mereka tetap mampu meningkatkan transaksi dan omset perdagangannya.

Perkembangan urusan perdagangan untuk nilai perdagangan luar negeri (ekspor) cenderung terus mengalami peningkatan, dan diharapkan peningkatan nilai ekspor ini juga melibatkan produk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) daerah sehingga dapat membantu mendorong minat pelaku UMK yang lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk yang berorientasi

ekspor. Berkaitan dengan sarana distribusi perdagangan, pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah jumlahnya cenderung tetap dan yang telah memenuhi SNI baru satu unit yaitu Pasar Tayu. Sedangkan apabila dilihat dari persebarannya, pasar tersebut hanya berada di sebelas wilayah kecamatan dengan rincian sebagai berikut: 7 (tujuh) unit pasar berada di Kecamatan Pati; masing-masing 2 (dua) unit di Kecamatan Juwana, Tayu, dan Winong; serta masing-masing 1 (satu) unit di Kecamatan Trangkil, Wedarijaksa, Kayen, Gembong, Margorejo, Dukuhseti, dan Margoyoso. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sarana distribusi perdagangan masih rendah dan persebarannya juga belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Beberapa hal yang perlu terus didorong guna meningkatkan kinerja

perdagangan daerah adalah penyediaan dan pengelolaan pasar daerah yang mengarah pada manajemen pasar modern dengan karakter pada pemenuhan kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Disamping itu, perlu juga para pedagang baik yang ada di pasar maupun pedagang rumahan difasilitasi untuk menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan usahanya sehingga dapat menjangkau konsumen maupun pelanggan secara lebih luas dan serta mengikuti tren keinginan kosumen yang cenderung berperilaku “praktis dan mudah”.

Urusan Perindustrian, Kontribusi lapangan usaha industri manufaktur dalam perekonomian daerah menempati urutan pertama diantara 17 (tujuh belas) lapangan usaha yang ada. Meskipun sebagai kontributor terbesar dalam perekonomian, ada kecenderungan penurunan proporsinya dalam PDRB sebagaimana kondisi lima tahun terakhir. Demikian pula dengan tren pertumbuhannya yang mengalami penurunan dalam kurun waktu yang sama. Hal ini yang sering disebut dengan proses deindustrialisasi. Kondisi deindustrialisasi yang berlarut-larut justru akan mengurangi kemampuan sektor industri manufaktur dalam menyerap tenaga kerja dan upaya menciptakan daya saing daerah. Pelaku industri skala rumah tangga yang jumlahnya semakin

meningkat tiap tahun dan mendominasi dalam lapangan usaha, dapat dijadikan modal bagi Pemerintah Daerah untuk pengembangan sektor hilir skala mikro-kecil dalam meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk khususnya industri yang memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dengan sektor hulu (pertanian). Mengacu pada upaya menciptakan keterkaitan hulu-hilir sektor usaha, maka jenis industri yang relevan adalah industri berbasis agro (agro-industri). Secara empiris bahwa Kabupaten Pati memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah untuk RKPD Kabupaten Pati Tahun 2023 mendukung sektor industri manufaktur berbasis pertanian. Ditinjau dari kondisi eksisting industri manufaktur yang berkarakter backward linkage di Kabupaten Pati adalah industri perikanan (skala kecil, menengah dan besar), industri tepung tapioka dan industri kuliner. Kabupaten Pati masih banyak membutuhkan industri manufaktur skala besar-menengah yang dapat berperan sebagai mitra bisnis pelaku usaha sektor hulu (pertanian) yang saling menguntungkan. Disamping agroindustri, industri kreatif juga cukup

berkembang di daerah ini. Industri kreatif sangat erat kaitannya dengan kreativitas dan inovasi, sehingga hal ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dan pembinaan/pendampingan/pelatihan (termasuk membangun jejaring usaha) dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi, lebih-lebih industri kreatif merupakan jenis industri yang semua pelakunya merupakan pelaku usaha skala mikro (rumah tangga) dan kecil. Poin penting dari urusan perindustrian adalah bagaimana menciptakan keterkaitan industri hulu dengan hilir agar bisa membentuk rantai nilai dan pasok (penciptaan nilai tambah dan kontinuitas pendukung industri) agar memiliki dampak ganda bagi perekonomian daerah serta daya saing produk industri manufaktur daerah. Selain itu industri rumah tangga juga harus diberikan fasilitasi dalam hal pemanfaatan teknologi produksi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pangsa pasar dan jejaring/kemitraan bisnis melalui konsep e-business baik dalam konteks business to business maupun business to consumer/customer.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sesuai Renja Tahun 2023 memiliki 2 Tujuan dan 2 Sasaran, yaitu :

Tujuan

1. Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah, dengan target Renja tahun 2023 yaitu Pertumbuhan Nilai Ekspor sebesar 8% dan Persentase perubahan harga pangan bergejolak (volatile food) sebesar 16,99%.
2. Meningkatnya Daya Saing Industri Daerah, dengan target Renja 2023 yaitu Pertumbuhan Nilai Tambah Industri Kecil sebesar 1,30%.

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pasar (fisik dan non fisik) dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
2. Meningkatnya Daya Saing Industri Kecil.

Untuk mencapai Target yang harus dicapai dalam Tujuan dan Sasaran maka isu strategis Tahun 2023 sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, yaitu :

1. Di Bidang Perdagangan

Isu Strategis yang menjadi fokus adalah a) Masih rendahnya sarana perdagangan tradisional yang memenuhi standar dan memenuhi daya tampung pelaku perdagangan skala kecil; b) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perdagangan; c) Belum optimalnya distribusi bahan pangan pokok dan bahan penting lainnya, dengan memperhatikan indikator sasaran yaitu Proporsi pelaku usaha yang mendapatkan komitmen ekspor, Nilai komitmen ekspor, Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terakreditasi SNI, Persentase Pelaku Perdagangan yang terakomodir di sarana perdagangan daerah, Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku, Persentase stok komoditas pangan bergejolak

2. Di Bidang Perindustrian

Isu Strategis yang menjadi fokus adalah a) Belum optimalnya pengelolaan data perindustrian yang terintegrasi; b) Belum optimalnya layanan perijinan industri karena belum terintegrasinya SIINas dengan Sistem Layanan Perijinan Berusaha secara elektronik dengan memperhatikan indikator sasaran yaitu Pertumbuhan jumlah Tenaga kerja, Pertumbuhan investasi industri kecil.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati memiliki dua urusan pilihan, yaitu Urusan Pilihan Bidang Perdagangan dan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sebanyak 9 Program, 16 kegiatan, 32 sub kegiatan. Penyebaran lokasi hampir merata di semua kecamatan, dengan pertimbangan potensi daerah masing-masing. Selain itu juga mempertimbangkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana Kecamatan yang telah ditempati lokasi kegiatan, mungkin akan diganti dengan Kecamatan lain, untuk pemerataan.

Selain itu juga memperhatikan potensi industri dan perdagangan yang layak dikembangkan.

Untuk Renja Tahun 2023, ada beberapa program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian arah dan tujuan pembangunan nasional maupun daerah, yaitu :

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

I. NON URUSAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. PROGRAM : PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

a. Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan sub kegiatan:

- Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui system pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

2. PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

a. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

b. Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;

3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

a. Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat;

b. Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;

- c. Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
 - 4. PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
 - a. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan;
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor;
 - 5. PROGRAM : PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
 - a. Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
 - 6. PROGRAM : PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
 - a. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
- III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
- 1. PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - a. Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri;
 - 2. PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan

Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota,
dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk Rancangan Akhir Renja tahun 2023 secara umum sebagai berikut:

I. NON URUSAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- a. Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- a. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan Sub Kegiatan:
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;

3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

- a. Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat;

- b. Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
 - c. Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
4. PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
- a. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan;
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor;
5. PROGRAM : PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- a. Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
6. PROGRAM : PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
- a. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
- 3) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1. PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
- a. Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;

- Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri;
2. PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
- a. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota;

Sedangkan untuk pendanaan pada Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 28.266.400.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati.

Program kegiatan tersebut tersebar secara merata di wilayah Kabupaten Pati dengan sasaran kelompok masyarakat. Pada Rancangan Awal ada perbedaan jumlah program, perbedaan jumlah kegiatan dan sub kegiatan jika dibandingkan dengan Rancangan Akhir. Dalam rancangan awal terdapat 10 program, 18 kegiatan dan 40 sub kegiatan, sedangkan pada Rancangan Akhir terdapat 9 program, 16 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Terdapat penambahan pagu indikatif dari Rancangan Awal Renja 2023 sebesar Rp.26.417.213.000,- menjadi Rancangan Akhir Renja sebesar Rp.28.266.400.000,-. Perbedaan ini lebih disebabkan karena adanya penambahan pokir dan adanya aspirasi dewan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya lebih jelas terkait dengan Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan dapat dilihat dalam tabel Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 SIPD berikut ini:

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pati
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3																		
3 30																		
3 30 01																		
3 30 01 2.01																		
3 30 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	3 Dokumen	20 Buku		5,092,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %		8,092,000		
3 30 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	20 Buku		5,083,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %		8,583,000		
3 30 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	20 Buku		4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %		8,900,000		
3 30 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	24 Laporan	20 Buku		3,162,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %		8,162,000		
3 30 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	2 Laporan	20 Buku		4,612,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %		8,613,000		
3 30 01 2.02																		
3 30 01 2.02 01																		
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya dokumen administrasi keuangan		100 %	2184 Orang/bulan	100 %		13,052,992,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi yang tertangani	100 %		13,377,338,000		
3 30 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terealisasinya dokumen administrasi keuangan		100 %	52 Dokumen	100 %		220,906,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi yang tertangani	100 %		220,906,400		
3 30 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terealisasinya dokumen administrasi keuangan		100 %	1 Laporan	100 %		1,411,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi yang tertangani	100 %		1,000,000		
3 30 01 2.06																		
3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									320,186,000						376,000,046		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pati
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pertumbuhan stok komoditas penyumbang inflasi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terpenuhinya informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting		9,25 %	96 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan stok komoditas penyumbang inflasi	9,25 %	30,000,000
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								15,000,000					30,000,000
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pertumbuhan stok komoditas penyumbang inflasi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Terpantaunya Informasi Terupdate Mengenai Harga Pupuk dan Pestisida		9,25 %	40 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan stok komoditas penyumbang inflasi	9,25 %	30,000,000
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								40,000,000					240,225,000
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								40,000,000					240,225,000
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh komitmen ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Terpenuhinya nilai ekspor pertahun		1 pelaku usaha	5 Pelaku Usaha	100 %	21,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh komitmen ekspor	1 pelaku usaha	105,225,000
3 30 05 2.01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh komitmen ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Terpenuhinya nilai ekspor pertahun		1 pelaku usaha	5 Pelaku Usaha	100 %	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh komitmen ekspor	1 pelaku usaha	135,000,000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								70,000,000					125,000,000
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								70,000,000					125,000,000
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pertumbuhan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			5 %	185000 Unit		70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	5 %	125,000,000
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								100,000,000					90,000,000
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								100,000,000					90,000,000
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pertumbuhan jumlah Produk UMKM difasilitasi yang terjual di dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Produk dalam negeri yang terjual		20 %	20 UMKM	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan jumlah Produk UMKM difasilitasi yang terjual di dalam negeri	20 %	90,000,000
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								90,000,000					175,000,000
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								70,000,000					125,000,000
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								70,000,000					125,000,000
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase capaian Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terpenuhinya Penyusunan dan evaluasi Rencaan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		10 %	2 Dokumen	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	10 %	30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pati
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah selama setahun		100 %	1 Unit	100 %	64,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %	122,800,000
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								50,600,000					130,339,000
3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan								50,600,000					120,339,000
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pedagang yang telah memiliki ijin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terpenuhinya Izin Pengelolaan Pasar dan Retribusi		27,88 %	1000 Dokumen	100 %	50,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pedagang yang telah memiliki ijin	27,88 %	120,339,000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								9,646,400,000					7,246,153,000
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								9,636,400,000					7,151,153,000
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku perdagangan yang sesuai ketentuan Persentase sarana perdagangan yang dibangun/diperbaiki	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Terpenuhinya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		37,64 % 100 %	20 Unit	100 %	9,449,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku perdagangan yang sesuai ketentuan Persentase sarana perdagangan yang dibangun/diperbaiki	37,64 % 100 %	6,879,250,000
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku perdagangan yang sesuai ketentuan Persentase sarana perdagangan yang dibangun/diperbaiki	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terpenuhinya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		37,64 % 100 %	20 Unit	100 %	187,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku perdagangan yang sesuai ketentuan Persentase sarana perdagangan yang dibangun/diperbaiki	37,64 % 100 %	271,903,000
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								10,000,000					95,000,000
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku perdagangan yang sesuai ketentuan Persentase sarana perdagangan yang dibangun/diperbaiki	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Realisasi pedagang dalam berusaha tidak sesuai ketentuan		37,64 % 100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku perdagangan yang sesuai ketentuan Persentase sarana perdagangan yang dibangun/diperbaiki	37,64 % 100 %	25,000,000
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								40,000,000					95,000,000
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								15,000,000					10,000,000
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pertumbuhan stok komoditas penyumbang inflasi	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terselenggaranya jumlah informasi terupdate mengenai stok kebutuhan pokok dan barang penting lainnya		9,25 %	48 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan stok komoditas penyumbang inflasi	9,25 %	10,000,000
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								10,000,000					55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pati
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	6 Paket	100 %	5,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %	14,650,000
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	48 Paket	100 %	246,640,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %	277,482,100
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	16 Paket	100 %	17,799,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %	17,961,946
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	72 Laporan	100 %	49,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %	65,906,000
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,396,880,000					4,620,440,000
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	6 Laporan	100 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %	6,000,000
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	480 Laporan	100 %	694,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %	744,200,000
3 30 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	4 Laporan	100 %	71,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %	71,100,000
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	194 Laporan	100 %	3,629,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %	3,799,140,000
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								214,674,000					298,204,000
3 30 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah selama setahun		100 %	58 Unit	100 %	150,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Disdagperin	100 %	175,404,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pati
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase capaian Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terpenuhinya Penyusunan dan evaluasi Rencaan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		10 %	2 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	10 %	35,000,000
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								20,000,000					50,000,000
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								20,000,000					50,000,000
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang diawasi Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya IKM/UKM Yang Memenuhi Standar		40 % 60 %	40 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang diawasi Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang difasilitasi	40 % 60 %	20,000,000
TOTAL									28,266,400,000					27,037,955,446

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Rencana kerja ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2023.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi pada setiap triwulannya. Selanjutnya jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023. Diharapkan semua sumber daya Perangkat Daerah terkait dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja aparatur.

BUPATI PATI,

HARYANTO



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN PATI TAHUN 2023

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Ketua Tim;

- b. Sekretaris Tim;
- c. Kelompok Kerja (POKJA) Data Perdagangan;
- d. Kelompok Kerja (POKJA) Data Perindustrian;
- e. Kelompok Kerja (POKJA) Teknis;

KETIGA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sebagaimana diktum KEDUA adalah:

- a. Ketua Tim; bertugas:
 - 1) mengarahkan dan memantau proses penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah sesuai jadwal dan tahapan yang sudah ditentukan;
 - 2) melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati.
- b. Sekretaris Tim; bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan penyusunan jadwal dan agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 2) mengkoordinasikan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Kelompok Kerja (POKJA) Data; bertugas:
 - 1) menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah dan disajikan dalam bentuk matrik untuk memudahkan analisis;
 - 2) mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 3) menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis;
 - 4) melakukan analisis data sebagai bahan penyusunan rencana kerja perangkat daerah.
- d. Kelompok Kerja (POKJA) Data Perdagangan dan Perindustrian, bertugas:

- 1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan penhgelolaan kegiatan Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi dan Informasi Perdagangan, serta kegiatan Perlindungan Konsumen.
 - 2) Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, dan kegiatan Pengembangan Standart Mutu dan Informasi Industri.
- e. Kelompok Kerja (POKJA) Teknis, bertugas:
- 1) Merumuskan, menyusun, dan menyajikan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah;
 - 2) Menyusun rancangan rencana kerja perangkat daerah;
 - 3) Menyelenggarakan forum perangkat daerah;
 - 4) Menyusun rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal

BUPATI PATI

HARYANTO

TEMBUSAN :
1. Wakil Bupati;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pati;
4. Inspektur Kabupaten Pati;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Pati;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati
 Nomor :
 Tanggal : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN PATI TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Sekretaris Tim
3.	Kelompok Kerja;	
	a. Kelompok Kerja (POKJA) Data;	
	1) Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Ketua Pokja
	2) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	3) Kepala Bidang Promosi dan Ekspor Impor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	4) Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	5) Kepala Sub.Bagian TU UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	6) Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	7) Kepala Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	8) Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	9) Kepala Seksi Retribusi, Perijinan dan Penagihan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	10) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	11) Kepala Seksi Ketertiban dan Kebersihan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	12) Kepala Seksi Promosi Produk Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	13) Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	b. Kelompok Kerja (POKJA) Data;	

NO.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1) Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Ketua Pokja
	2) Kepala Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	3) Kepala Seksi Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	4) Kepala Seksi Pengembangan Standart Mutu dan Informasi Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	c. Kelompok Kerja (POKJA) Teknis;	
	1) Subbagian Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Ketua Pokja
	2) Subbagian Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	3) Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	4) 2 orang Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota

BUPATI PATI

HARYANTO



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN PATI TAHUN 2023

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal

BUPATI PATI,

HARYANTO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;
4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.